

RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK) **TAHUN 2025 - 2029**

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan Kuasanya, Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo Tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekarantinaan di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2025-2029, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2025 - 2029 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi kepala seksi dibawah Satuan kerja, diharapkan RAK 2025 – 2029 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2025 - 2029 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Gorontalo, 15 Januari 2025
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Gorontalo



Suprpto, SKM, M.Kes(Epid)
NIP. 197005181993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Tantangan.....	5
C. Potensi dan Permasalahan	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	14
A. Visi dan Misi.....	14
B. Tujuan Strategi.....	16
C. Sasaran Strategi	17
D. Indikator Kinerja	17
E. Arah Kebijakan dan Strategi.....	20
BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN.....	25
A. Kerangka Logis.....	25
B. Rencana Kegiatan	28
C. Kerangka Kelembagaan	33
D. Kerangka Regulasi	36
E. Kerangka Pendanaan	40
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM.....	41
A. Pemantauan	41
B. Evaluasi.....	42
C. Pengendalian	43
BAB V PENUTUP.....	44
LAMPIRAN 1 : Kerangka Logis Program	45
LAMPIRAN 2 : Matriks Target Kinerja Program dan Pendanaan	55
LAMPIRAN 3 : Matriks Definisi Operasional dan Cara Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan RAK 2025 - 2029.....	57
LAMPIRAN 4 : Matriks Strategi Pencapaian Program	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Distribusi Pegawai Menurut Jabatan	6
Tabel 2.1 : Indikator KKP 2025-2029	18
Tabel 3.1 : Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan.....	25
Tabel 3.2 : Cascading Indikator Program dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	26
Tabel 3.3 : Perubahan Penetapan Target Kinerja Periode 2025-2029	28
Tabel 3.4 : Kerangka Pendanaan Kegiatan	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Periode tahun 2025-2029 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2025-2029 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Dokumen revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif sebagai bagian integral dari Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara Nasional. Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan kelanjutan dari Rencana Aksi Kegiatan sebelumnya dengan beberapa perubahan yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya menyesuaikan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru, adanya revisi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI, hasil reuiu SAKIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI yang menyatakan masih ada indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi metode SMART (*Specific, Measurable, Attainable/Achievable, Relevant, Time Bound*), serta pemahaman terhadap sumber data indikator kinerja kegiatan untuk setiap Kantor Kesehatan Pelabuhan masih belum sama. Perubahan ini bertujuan untuk

meningkatkan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan faktor risiko di pintu masuk.

Kawasan Asia Tenggara menurut WHO memiliki kondisi yang mengundang munculnya Penyakit Infeksi Emerging (PIE), sehingga pada akhir Tahun 2019 yang lalu telah terjadi penyebaran Penyakit Infeksi Emerging hampir di seluruh negara yang meningkat sangat cepat, baik dalam jumlah kasus baru di dalam satu populasi, ataupun penyebarannya ke daerah geografis yang baru (*re-emerging infectious disease*) yang dikenal dengan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dan telah dinyatakan oleh WHO sebagai *pandemic* pada Tahun 2020. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut terdampak akibat *pandemic COVID-19* ini dan dinyatakan sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upayapenanggulangan dan upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko di pintu masuk negara agar tidak terjadi peningkatan kasus.

Upaya penanggulangan dan pengendalian penyakit dan faktor risiko tersebut adalah langkah awal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan Ketahanan Kesehatan yang sangat mendasar. Ketahanan Kesehatan yang runtuh dapat mengakibatkan ketahanan yang lainnya goyah seperti ketahanan ekonomi. Ancaman *COVID-19* maupun penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) lainnya memberikan pelajaran yang berharga bagi Ketahanan Kesehatan. Kantor Kesehatan Pelabuhan harus mempunyai kemampuan menilai status kesehatan termasuk di dalamnya adalah kemampuan diagnosa dan investigasi terhadap lalu lintas orang, barang dan alat angkut yang masuk melalui pintu- pintu masuk negara yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan garda terdepan menjaga ketahanan kesehatan di pintu masuk di masing-masing negara, baik di pelabuhan udara/ bandara, pelabuhan laut maupun lintas batas darat negara.

Perkembangan *COVID-19* berdasarkan data Kementerian Kesehatan sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 terdapat kasus terkonfirmasi positif sebanyak 6.278.338 orang, sembuh sebanyak 6.067.518 orang dan

meninggal sebanyak 157.208 orang. Sedangkan data di Propinsi Gorontalo terhitung sejak ditemukannya kasus pertama sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 terakumulasi kasus positif sebesar 13.937 orang, pasien sembuh sebanyak 13.431 orang, meninggal dunia sebanyak 487 orang, dan 19 pasien dalam perawatan.

Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi ancaman COVID-19 maupun penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) lainnya di pintu masuk (pelabuhan dan bandar udara). Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas inti di seluruh pintu masuk melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan termasuk wilayah kerjanya. Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan alat angkut, orang, barang dan lingkungan yang datang dari wilayah/negara terjangkau dan pelayanan vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk mendeteksi (*detect*), mencegah (*prevent*), dan merespon (*respond*) terhadap COVID-19 dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) lainnya di Pelabuhan/Bandara terutama di wilayahProvinsi Gorontalo.

Dalam upaya peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan faktor risiko di pintu masuk, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo telah melakukan berbagai program kegiatan yang dilaksanakan masing-masing substansi kegiatan yaitu kegiatan Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE), kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL), kegiatan Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah (UKLW) dan kegiatan dukungan manajemen, antara lain :

a. Pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standarkekarantinaan Kesehatan

Hasil kegiatan ini hingga Tahun 2021 sebanyak 770.497 atau 128 % dari target sebanyak 600.000. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal, kondisi tersebut seiring dengan peningkatan pengawasan di pintu masuk yang lebih intensif serta didukung dengan jejaring kerja lintas program dan lintas sektor yang lebih baik.

b. Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk

Pada Orang, AlatAngkut, Barang dan Lingkungan

Hasil kegiatan ini hingga Tahun 2021 sebesar 100 % atau 105 % dari target sebesar 95 %. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian faktor risiko di pintu masuk telah dilakukan secara optimal seiring dengan peningkatan jejaring kerja dan kemitraan, koordinasi dan sinergi dengan lintas program dan lintas sektor.

c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

Status faktor risiko di pintu masuk negara ini hingga Tahun 2021 tercapai sebesar 99.8% atau 110.8 % dari target sebesar 90 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dapat dilaksanakan secara optimal seiring dengan peningkatan jejaring kerja dan kemitraan, koordinasi dan sinergi dengan lintas program dan lintas sektor.

d. Pelaksanaan Kinerja Anggaran

Kinerja ini tercapai melebihi target yang ditetapkan hingga Tahun 2021 tercapai sebesar 85.49 atau 103 % dari target sebesar 83. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dan capaian rincian output dapat tercapai secara optimal dengan dukungan sinergi dan komitmen pengelola program, pengelola monev dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan meskipun kondisi pandemi covid-19 masih belum berakhir.

e. Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Kinerja ini tercapai melebihi target yang ditetapkan hingga Tahun 2021 tercapai sebesar 95,51 atau 102.7 % dari target sebesar 93.. Hal ini menunjukkan bahwa 4 kriteria penilaian dapat terpenuhi dengan baik dengan dukungan sinergi dan komitmen pengelola keuangan dan Tim SAI, pengelola program, dan pengelola monev meskipun kondisi pandemi covid-19 masih belum berakhir.

f. Kinerja implementasi WBK satker

Kinerja ini tercapai melebihi target yang ditetapkan hingga Tahun 2021 tercapai sebesar 77.68 atau 103.6 % dari target sebesar 75. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan pengelolaan manajemen satker dan persepsi korupsi dan masing-masing Pokja telah melakukan upaya secara optimal untuk melengkapi semua persyaratan kriteria penilaian menuju Satker WBK.

g. Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Hasil kegiatan ini hingga Tahun 2021 sebesar 96.87 % atau 121.1 % dari target sebesar 80 %. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian target kinerja dan kondisi pandemi covid-19 yang mulai pulih, sehingga semakin membuka kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan SDM dengan jumlah jam pelajaran yang lebih mudah terpenuhi sebanyak 20 JPL.

B. Potensi dan Tantangan

Seiring dengan perkembangan kondisi global dan teknologi informasi, maka Balai Kekearifan Kesehatan Kelas I Gorontalo sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dalam cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh potensi dan peluang serta tantangan yang harus dihadapi dan diantisipasi agar pelaksanaan deteksi dini dan respons pencegahan dan pengendalian penyakit serta faktor risiko dapat berjalan secara optimal.

1. Potensi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Balai Kekearifan Kesehatan Kelas I Gorontalo, hingga saat ini telah didukung dengan potensi sumber daya, sarana dan prasarana yang cukup memadai baik untuk pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit pada kantor Induk maupun Wilayah Kerja.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang merupakan kekuatan personil sampai dengan awal Tahun 2020 di lingkungan KKP Kelas II

Gorontalo untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi terdiri atas : PNS berjumlah 37 orang dan Tenaga Honorer berjumlah 22 orang. Keadaan ini apabila dibandingkan dengan volume kegiatan dan beban kerja KKP Kelas II Gorontalo masih sangat kurang.

Adapun distribusi pegawai menurut jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Distribusi Pegawai Menurut Jabatan
Kepala Balai Kekejarantinaaan Kesehatan
Kelas I Gorontalo

NO	Nama Jabatan	Jumlah	Ket
1	Kepala Balai	1	Struktural (Eselon III.a)
2	Ka Sub Bag Adum	1	Struktural (Eselon IV.a)
3	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1	JF
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	1	JF
5	Analisis Kebijakan BMN	1	JP
6	Arsiparis Ahli Pertama	1	JF
7	Asistem Apoteker Terampil	1	JF
8	Dokter Muda	1	JF
9	Dokter Pertama	1	JF
10	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	1	JF
11	Entomolog Kesehatan Mahir	2	JF
12	Entomolog Kesehatan Terampil	1	JF
13	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	2	JF
14	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	3	JF
15	Epidemiolog Kesehatan Terampil	1	JF

NO	Nama Jabatan	Jumlah	Ket
16	Pengadministrasi Keuangan	1	JP
17	Perawat Mahir	6	JF
18	Perawat Terampil	2	JF
19	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	JF
20	Pranata Laboratorium Terampil	1	JF
21	Sanitarian Ahli Muda	1	JF
22	Sanitarian Ahli Pertama	1	JF
23	Sanitarian Mahir	2	JF
24	Sanitarian Terampil	1	JF
25	Sanitarian	2	JP
Jumlah		37	

b. Sarana dan Prasarana

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo sudah memiliki gedung permanen milik sendiri dan yaitu Kantor Induk yang terletak di Kec. Tibawa Kab. Gorontalo, Wilker Anggrek di Pelabuhan International Anggrek dan Pos Pelabuhan Laut di Pelabuhan Laut Gorontalo; Sedangkan yang sudah memiliki lahan namun belum mempunyai bangunan adalah Wilker Tilamut dan Wilker Kwandang yang sedang proses lelang pengadaan bangunan; untuk wilker Bandara menggunakan fasilitas bandara, dan wilker pakuat sedang proses pengadaan lahan di tahun anggaran 2022

Untuk kendaraan bermotor terdiri atas Mobil Ambulance sebanyak 4 unit, Mobil Quarantine Boarding sebanyak 1 unit, Mobil Pengendalian Vektor sebanyak 1 unit, mobil operasional 2 unit, motor operasional sebanyak 2 unit dan motor lapangan sebanyak 6 unit.

Peralatan dan mesin lainnya hingga saat ini telah tersedia peralatan kesehatan, perangkat pengolah data dan komunikasi, serta peralatan perkantoran. Beberapa kondisi peralatan dan mesin telah mengalami penurunan fungsi dan belum dapat dilakukan pergantian karena adanya kebijakan moratorium belanja modal untuk pemenuhan kebutuhan belanjaaset tertentu.

2. Peluang

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berkantor di daerah Provinsi Gorontalo, memiliki peran strategis antara lain :

- a. Kerjasama dengan lintas sektor terjalin dengan baik dengan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dalam penanganan vaksinasi bagi calon jamaah haji dan umrah dan penanganan Embarkasi / Debarkasi Haji.
- b. Pelabuhan dan Bandara merupakan titik simpul pertemuan atau aktifitas keluar masuk pesawat, barang dan orang, sekaligus sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit, dan merupakan ancaman global terhadap kesehatan masyarakat karena adanya penyakit karantina, penyakit menular baru (new emerging diseases), maupun penyakit menular lama yang timbul kembali (re-emerging diseases) sehingga pentingnya koordinasi dan sinkronisasi upaya sistem kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan kontijensi Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat (PHEIC) di pintu masuk negara dengan semua stake holder dan instansi terkait lainnya.
- c. Pengembangan Sistem Informasi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dengan adanya website <https://kkpgorontalo.id/>, media sosial, berupa instagram dan facebook yang berguna sebagai media informasi ke publik.

3. Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi tentunya Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo tidak lepas dari tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit antara lain :

a. Pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan Kesehatan

1. Masih terdapat permasalahan terkait keterbatasan SDM kekarantinaan kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan terutama untuk pengawasan pada wilayah Bandara Djalaluddin Gorontalo yang tidak sesuai dengan Anjab/ABK.
2. Kurangnya respon dari pihak otoritas pelabuhan dan atau bandara (LPLS) dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang diberikan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan pelaku perjalanan di pelabuhan dan bandara yang masih ditemukan belum sesuai ketentuan.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang persyaratan bagi pelaku perjalanan baik melalui udara ataupun laut mengenai vaksinasi dan pemeriksaan covid-19 sehingga kadang masih terjadi keributan antara pelaku perjalanan dan petugas.

b. Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

- 1) Perlu peningkatan kapasitas inti (*core capacities*) dalam cegah tangkal penyakit di pintu masuk.
- 2) Belum adanya sarana penunjang kegiatan preventif dalam rangka menghadapi Covid-19, masih adanya pelaku perjalanan yang kurang kooperatif dengan kegiatan preventif

yang kurang menarik.

- 3) Keterbatasan alat screening yang sesuai standar pemeriksaanscreening lanjutan.
- 4) Keterbatasan alat angkut penunjang Penyelidikan Epidemiologi (PE) serta akses menuju lokasi yang sulit dijangkau.
- 5) Pada saat terkonfirmasi positif Covid-19/ faktor risiko penyakit lainnya, pelaku perjalanan terkadang tidak kooperatif untuk dilakukan rujukan ke rumah Karantina/ rujukan ke fasilitas Kesehatan.
- 6) Sosialisasi pemahaman terhadap SOP yang kurang maksimal.
- 7) Pada kelengkapan syarat pengiriman jenazah masih ada yang belum lengkap, seperti pada masa pandemi Covid-19 masih ada jenazah yang tidak dilengkapi dengan surat hasil PCR sesuai dengan aturan Tim Gugus Covid-19.
- 8) Pada tindakan penyehatan alat angkut (berupa desinfeksi, desinseksi, dan fumigasi), masih adanya pemilik kapal (*high risk*) menghindar untuk dilakukan tindakan penyehatan pada kapalnya dengan alasan kapal harus berangkat dan terancam merugi sehingga fumigasi batal dilaksanakan.
- 9) Pada tindakan karantina alat angkut, masih adanya pemilik kapal (*high risk*) tidak kooperatif dalam pelaksanaan karantina kapal dengan alasan akan menghambat kegiatan bongkar muat kapal yang akan mengakibatkan *over cost*.
- 10) Rekomendasi perbaikan untuk pemeriksaan tempat-tempat umum di wilayah bandara/pelabuhan yang diberikan sangat jarang ditindaklanjuti oleh pihak pengelola dengan alasan keterbatasan anggaran.
- 11) Pemberian rekomendasi untuk dilakukan tindakan pengendalian (desinfeksi) pada kapal *high risk* dijumpai indikasi PHEIC (covid19) dalam pelaksanaan kegiatannya

terkendala jika kapal penumpang/ komersial yang bersangkutan tidak bisa sandar terlalu lama di Pelabuhan, karena jadwal keberangkatan yang tidak bisa ditunda atau dibatalkan.

- 12) Pada tindakan pengendalian vektor berupa larvaciding dan fogging di wilayah Pelabuhan/ bandara, masyarakat menganggap fogging lebih efektif menekan penyebaran vektor DBD (lebih menyukai Fogging daripada larvaciding) , bila ada RT yang difogging maka RT lain akan minta difogging walaupun HI masih memenuhi syarat ($HI < 1$).
- 13) Kesulitan dalam mendapatkan kader laki-laki untuk partisipasi masyarakat sebagai kader Kesehatan lingkungan dalam mewujudkan wilayah bebas vektor DBD di daerah buffer pengawasan KKP di Pelabuhan/ bandara.

c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

- 1) Tidak sinkronnya aturan pusat dan daerah dan terlalu sering mengalami perubahan, sehingga menyulitkan petugas dalam menerapkan peraturan.
- 2) Kesulitan koordinasi lintas sektor karena adanya perubahan peraturan.
- 3) Kurangnya jumlah SDM dalam rangka peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan alat angkut selama pandemi covid-19 di pintu masuk pelabuhan dan bandara.

d. Pelaksanaan Kinerja Anggaran

- 1) Konsistensi pelaksanaan Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA.
- 2) Efisiensi pada bulan berjalan belum menunjukkan efisiensi sesungguhnya sehingga nilai kinerja anggaran pada bulan berjalan sering nilai fluktuatif.
- 3) Capaian melebihi target dianggap sebagai data anomali.

e. Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran

- 1) Masih adanya deviasi halaman III DIPA.
- 2) Masih adanya kegiatan tidak terserap di beberapa kegiatan.
- 3) Masih adanya ketidakcermatan operator SAS dalam pembuatan SPM.

f. Kinerja implementasi WBK satker

- 1) Penilaian terhadap kertas kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) masih memerlukan pendampingan Hukormas P2 untuk memahami dan mempelajari unsur-unsur penilaian yang dilakukan.
- 2) Penilaian WBK dilakukan secara virtual meeting, sehingga adanya keterbatasan dalam penjelasan dokumen yang disampaikan dan hasil penilaian.

g. Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

- 1) Adanya perbedaan area waktu antara pihak penyelenggara dengan peserta sehingga tidak seluruhnya proses kegiatan pelatihan formal secara online dapat diikuti.
- 2) Adanya gangguan jaringan internet apabila pelatihan dilaksanakan secara online.
- 3) Tidak semua ASN melaporkan dan menyerahkan sertifikat hasil peningkatan SDM yang telah diikuti.

Bebagai tantangan tersebut di atas perlu dilakukan upaya antisipasi dan dikendalikan, untuk memastikan pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang berlokasi di daerah yaitu Provinsi Gorontalo. Tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas KKP Kelas II Gorontalo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kekarantinaan kesehatan; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029 telah menetapkan Visi Presiden 2025-2029 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2025-2029 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2 menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”

Selaras dengan visi Ditjen P2, Balai Kekeparantinaan Kesehatan menjabarkan visi Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo yakni **Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko.**

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2 telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaikan Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Balai Kekarantina Kesehatan Kelas I Gorontalo telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi BKK Kelas I Gorontalo yakni:

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

B. Tujuan Strategis

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2025 - 2029 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2 maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2 pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko diwilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2, maka BKK telah menetapkan tujuan strategis BKK Kelas II Gorontalo yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2029**

C. Sasaran Strategis

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran strategis Ditjen P2 yakni:

1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
2. Menurunnya infeksi penyakit HIV
3. Menurunnya Insiden TBC
4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
5. Meningkatnya kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta
6. Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat
10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
11. Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis KKP Kelas II Gorontalo telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2 yakni Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100 % pada akhir tahun 2024. Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.

D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja KKP pada RAK awal tahun 2025-2029 telah mengalami perubahan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2025 - 2029 khususnya pada indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Secara lengkap indicator revisi tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator KKP Tahun 2025-2029

Indikator Tahun 2020 - 2024 (semula)	Indikator Tahun 2025-2029
Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Indeks deteksi faktor risiko di bandara/ Pelabuhan / PLBDN
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker
Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Tahun 2025 - 2029, BKK telah menetapkan 7 indikator yakni:

1. Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN

Indeks deteksi faktor risiko di bandara/pelabuhan/PLBDN menggambarkan kinerja deteksi dini factor risiko di bandara/pelabuhan/PLBDN. Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh KKP Kelas II Gorontalo.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.

4. Nilai kinerja anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran berdasarkan hasil perhitungan realisasi anggaran dan capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA.

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KKP Kelas II Gorontalo dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

6. Kinerja implementasi WBK satker

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.

E. Arah Kebijakan dan Strategi

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen P2 merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2 yakni Memperkuat Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan Penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2 yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sector dan penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan BKK Kelas I Gorontalo dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Mekanisme dan Re-Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kegiatan
2. Perluasan Cakupan Deteksi Dini Penyakit dan Faktor Risiko

3. Peningkatan Respon Kejadian Penyakit dan Faktor Risiko
4. Peningkatan Inovasi Dalam Deteksi Dini dan Respon Penyakit Serta Faktor Risiko
5. Peningkatan Pengendalian Risiko Lingkungan Secara Lebih Efektif
6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
7. Peningkatan Penerapan Akuntabilitas Dalam Administrasi Dan Pelayanan
8. Peningkatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja
9. Peningkatan Komunikasi dan Advokasi Lintas Sektor dan Lintas Program
10. Peningkatan Jejaring dan Kerjasama Lintas Sektor Dan Program
11. Penyusunan Formasi Kebutuhan CPNS ASN dan Pengangkatan Tenaga Non ASN.
12. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Dan Prasarana Administrasi dan Pelayanan Kekearifan Kesehatan

Untuk mencapai indikator kinerja kegiatan secara khusus dilakukan strategi-strategi sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis I : **Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah.**

Indikator Kinerja Kegiatan :

a. Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN

- 1) Pemenuhan SDM kekearifan yaitu melalui pengangkatan CPNS maupun mutasi pegawai dari instansi lain, dan pengangkatan tenaga relawan untuk melaksanakan pengawasan selama masa pandemic covid-19 di wilayah Bandara/Pelabuhan.
- 2) Pelaksanaan sosialisasi melalui media cetak berupa banner, leaflet, penyuluhan secara langsung pada saat proses validasi/pemeriksaan dan media online satker.
- 3) Pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial instagram tentang peraturan bagi pelaku perjalanan udara dan laut.
- 4) Pendekatan lebih intensif berupa komunikasi cepat /langsung terhadap jejaring kerja (LPLS) di pelabuhan dan bandara sehingga

penyampaian informasi kepada masyarakat terkait peraturan yang telah ditetapkan dapat diterima dengan baik.

b. Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

- 1) Pengadaan alat screening lanjutan yang memadai untuk pemeriksaan orang.
- 2) Pengadaan alat angkut penunjang Penyelidikan Epidemiologi (PE) yang memadai dan dapat menjangkau lokasi.
- 3) Pemberian edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan penyakit berpotensi KLB (Covid-19) melalui media *online* maupun *offline*
- 4) Koordinasi dengan LPLS terkait penanganan rujukan ke rumah karantina/ fasilitas Kesehatan terkait penemuan pelaku perjalanan terkonfirmasi positif Covid-19/ faktor risiko penyakit lainnya.
- 5) Pemberian edukasi kepada keagenan, nahkoda/ awak kapal terkait pentingnya tindakan penyehatan dan tindakan karantina kapal untuk mencegah dan mengendalikan penyakit baik menular maupun tidak menular.
- 6) Penyebarluasan SOP secara menarik dan mudah dipahami melalui pendekatan dan komunikasi langsung dengan pihak terkait.
- 7) Pemberian rekomendasi perbaikan untuk penyehatan lingkungan di wilayah Bandara/ Pelabuhan.

c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

- 1) Pengaktifan sistem komunikasi cepat untuk melakukan *update* informasi dan menyeragamkan pemahaman terkait peraturan yang berlaku dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk.
- 2) Penyampaian laporan secara berjenjang dari level petugas hingga ke pemangku jabatan sehingga mempermudah koordinasi lintas sektor karena adanya perubahan peraturan.

- 3) Penambahan jumlah SDM dengan rekrutmen tenaga PPPK untuk memperkuat pengawasan lalu lintas orang dan alat angkut di pintu masuk pelabuhan dan bandara.

Sasaran Strategis II : **Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.** Indikator Kinerja /Kegiatan :

a. Nilai Kinerja Anggaran

- 1) Komitmen Bersama pengelola program dan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan dan penarikan dana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 2) Koordinasi dengan pusat terkait capaian yang melebihi target yang dianggap sebagai data anomali.

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

1. Melakukan revisi halaman III DIPA sesuai jadwal yang ditetapkan atau apabila ada perubahan rencana penarikan dana agar nilai pada IKPA meningkat.
2. Melakukan evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan anggaran kegiatan sesuai RPK dan RPD.
3. Meningkatkan ketelitian dan kecermatan operator dalam pembuatan SPM sehingga mengurangi kesalahan dalam pembuatan SPM.

c. Kinerja implementasi WBK satker

- 1) Pendampingan Hukormas P2 dalam rangka meningkatkan kinerjaimplementasi WBK.
- 2) Persiapan dan penyampaian dokumen penilaian WBK secara tepat waktudengan meningkatkan Kerjasama tim Pokja.

d. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

- 1) Penguatan jaringan internet dan pemberian paket internet untuk ASN yang mengikuti pelatihan secara daring/ via *online*.
- 2) Penyediaan anggaran yang cukup dalam rangka peningkatan kapasitas ASN dalam rangka memenuhi kompetensi sesuai tupoksi ASN.
- 3) Penyampaian hasil dan sertifikat untuk pelatihan/Pendidikan yang

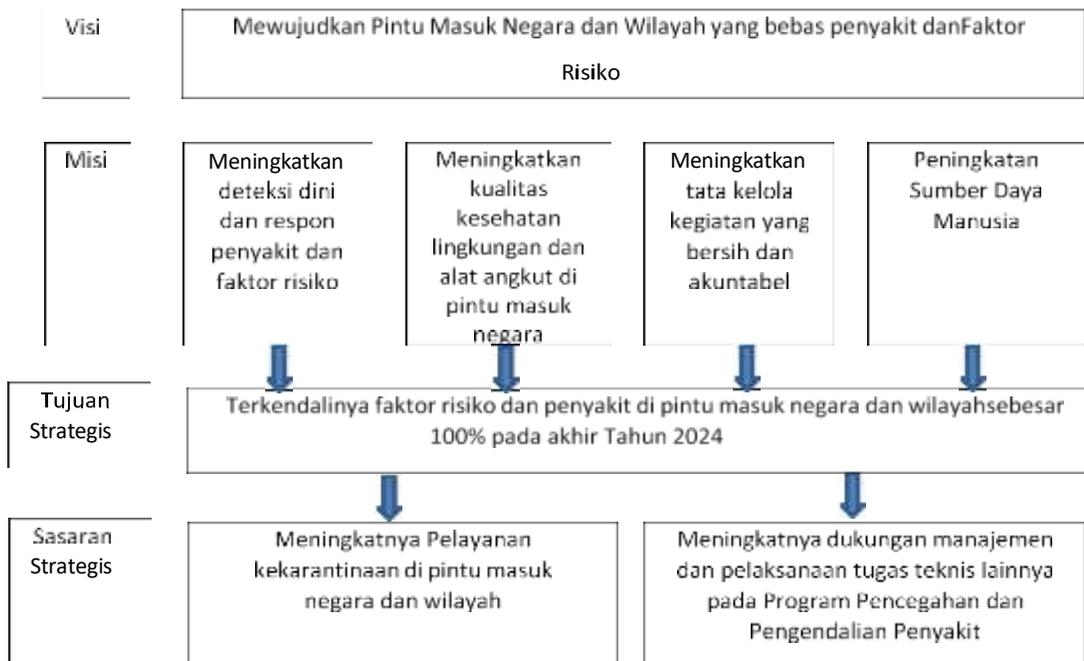
telah diikuti sehingga memudahkan bagian kepegawaian untuk meakumulasikan jumlah pegawai yang telah ditingkatkan kompetensinya.

BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN

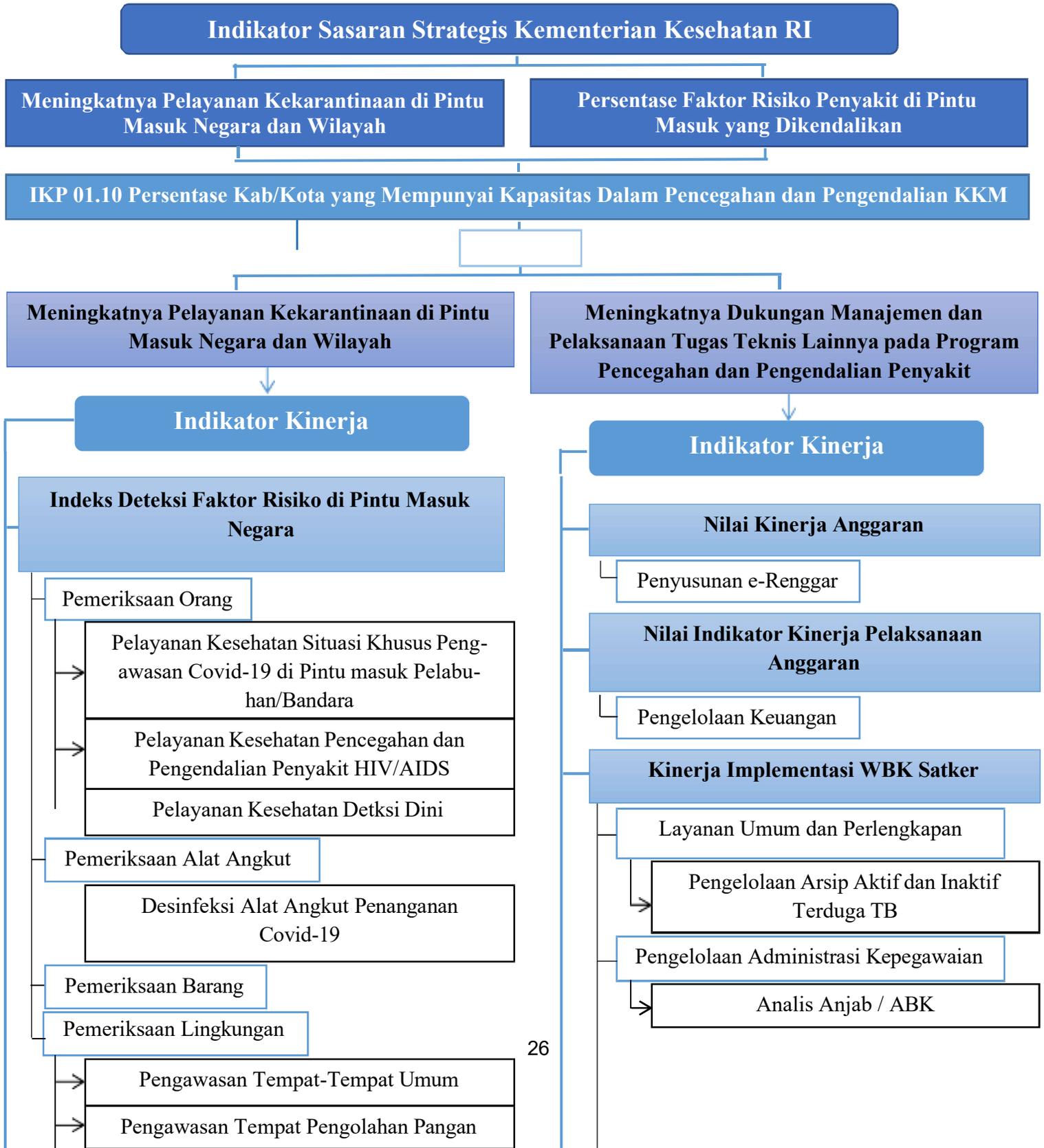
A. Kerangka Logis

Kerangka Logis Rencana Aksi Kegiatan BKK Kelas I Gorontalo dapat digambarkan pada tabel berikut di bawah ini.

**Tabel 3.1
Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan**



Tabel 3.2
Cascading Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan



Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut Dan Barang

Faktor Resiko Pada Orang

Pelayanan Mobile Vaksinasi Covid-19

Desinfeksi Alat Angkut Penanganan Covid-19

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara

Kelengkapan Data Surveilans

Surveilans Epidemiologi

Penyelidikan Epidemiologi

Penyelidikan Epidemiologi Penanganan Pandemi Covid-19 di Pintu Masuk

Jumlah Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang Dari 24 Jam

Surveilans Kewaspadaan Dini di Wilayah Pelabuhan dan Bandara

Penyusunan Rencana Kontingensi

Indeks Pinjal ≤ 1

Pemasangan Perangkat Tikus

HI perimeter = 0

Tidak ditemukan Larva Aedes Aegypti

Survey Vektor DBD

Kepadatan Kecoa Rendah

Kepadatan Lalat > 2

Pengendalian Vektor Diare (*Spraying*)

Survey Vektor Diare

TTU Memenuhi Syarat

Pengawasan Tempat-Tempat Umum

Pelaporan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program

Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja

Evaluasi Pelaksanaan Program P2

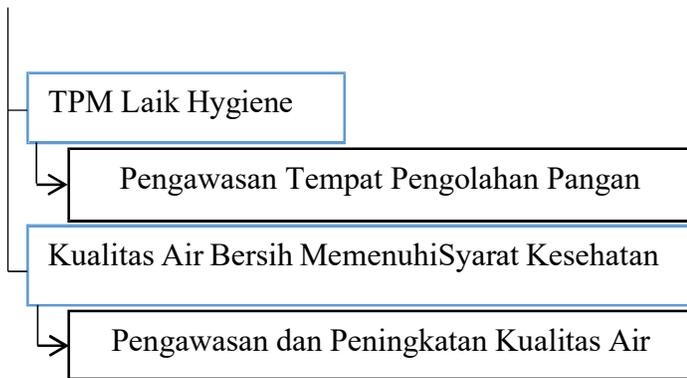
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pelatihan Bidang Kesehatan

Peningkatan Kulits SDM Teknis JF Entomolog/Sanitarian

Pelatihan BTCLS

Peningkatan Jumlah SDM Kekarantinaan / Surveilans Epidemiologi



B. Rencana Kegiatan

Table 3.3
Perubahan Penetapan Target Kinerja Periode 2025-2029

NO	TUJUAN PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1			Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	715.821	715.821	727.060	727.0601	738,281
			Indeks Deteksi Faktor Risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN	0,93	0,93	0,94	0,94	0,95
				708.982	708.982	720.000	720.000	731.000
				6.500	6.500	6.700	6.700	6.900
				25	25	30	30	35
				314	314	330	330	346
2			Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	98%	98%	98%	98%	98%
				98%	98%	98%	98%	98%
				98%	98%	98%	98%	98%
				98%	98%	98%	98%	98%
3	Meningkatnya Kemampuan Surveilans Berbasis Laboratorium	Meningkatnya Pelayanan Kekearifantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	100	100	100	100	100
				0,93	0,93	0,94	0,94	0,95
			Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/	22	22	25	25	28

			PLBDN	54	54	60	60	66
				72	72	82	82	92
				72	72	82	82	92
				12	12	18	18	21
				24	24	30	30	36
				24	24	30	30	36
				69	69	78	78	87
				69	69	78	78	87
				12	12	17	17	20

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Kegiatan, maka perlu ditetapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga seluruh target indikator kinerja kegiatan dapat tercapai pada Tahun 2024.

Untuk mencapai Sasaran Strategis I : **Meningkatnya Pelayanan Kekeparantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah**, kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masing-masing indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN, kegiatan yang dilakukan :
 - 1) Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Pelabuhan dan Bandara
 - 2) Pembentukan Forum Pelabuhan/Bandar Udara Sehat
 - 3) Pertemuan Evaluasi Forum Pelabuhan/ Bandara Sehat
 - 4) Pelayanan Kesehatan
 - 5) Layanan Kekeparantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP
 - 6) Layanan Kekeparantinaan Kesehatan di Pelabuhan Penyeberangan
 - 7) Layanan Kekeparantinaan Kesehatan di Bandar Udara
 - 8) Layanan Kekeparantinaan dalam Rangka Penerbitan PHQC
 - 9) Layanan Pemeriksaan P3K kapal
 - 10) Layanan Kesehatan pada Situasi Khusus
 - 11) Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi
 - 12) Pelayanan Kesehatan Embarkasi
 - 13) Pelayanan Kesehatan Debarkasi
 - 14) Pemeriksaan Alat Angkut, Orang dan Barang di Pelabuhan/Bandara
 - 15) Pemeriksaan Alat Angkut, Orang dan Barang pada situasi KLB/Wabah/KKM
 - 16) Verifikasi terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang mengajukan persetujuan penerbitan ICV
 - 17) Pengawasan terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang melaksanakan penerbitan ICV
 - 18) Pertemuan evaluasi LS,LP, dan Klinik/RS Penerbitan Dokumen ICV

- 19) Pelayanan Vaksinasi
- 20) Pelayanan mobile vaksinasi Covid-19
- 21) Layanan survei vektor PES
- 22) Layanan survei faktor risiko penyakit DBD
- 23) Layanan survei faktor risiko penyakit Malaria
- 24) Layanan survei faktor risiko penyakit diare
- 25) Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS
- 26) Layanan survei faktor risiko penyakit TB
- 27) Pengadaan sarana dan prasarana Pengendalian Vektor dan BPPbb.
Pengadaan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan
- 28) Pengadaan Alat dan Bahan Medis dan Non Medis Untuk Pelayanan
Pengadaan sarana dan prasarana Penanganan Covid-19
- 29) Koordinasi Pelayanan kekarantinaan di Pelabuhan/Bandara/PLB. Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria

b. Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan, kegiatan yang dilakukan :

- 1) Tindakan Pengendalian Faktor Risiko pada Situasi Khusus dan KLB
- 2) Penyelidikan Epidemiologi Faktor Risiko pada Situasi Khusus dan KLB
- 3) Penyehatan Lingkungan melalui pemeriksaan sanitasi lingkungan :
Kualitas air, makanan, limbah, udara, kebisingan dan sanitasi gedung/bangunan
- 4) Uji Resistensi Insektisida
- 5) Pelayanan rujukan dan respon cepat
- 6) Tindakan Pengendalian Faktor Risiko Alat angkut, Orang dan Barang
- 7) Pengelolaan Limbah Medis
- 8) Pelayanan Kesehatan Rutin / Vaksinasi International dan Poliklinik diPelabuhan/Bandara
- 9) Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandara
- 10) Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Penerbitan SSCC/SSCEC

- 11) Layanan Tindakan Penyehatan Alat Angkut
- 12) Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan
- 13) Layanan Pengendalian Vektor
- 14) Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan Termasuk Pemeriksaan RectalSwab

c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara, kegiatan yang dilakukan:

- 1) Pengumpulan, Analisa data, diseminasi hasil surveilans Sosialisasi
- 2) Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi KKM
- 3) Reviu Dokumen Rencana Kontinjensi KKM
- 4) Simulasi / *Table Top Exercise* Penanggulangan KKM
- 5) Peningkatan kapasitas SDM Sanitarian dan Entomolog
- 6) Peningkatan kualitas SDM kualifikasi Karantina Kesehatan dan SurveilansEpidemiologi
- 7) Peningkatan kualitas SDM Kualifikasi tenaga medis dan paramedis
- 8) Refreshing Tim TGC dalam pengendalian dan penanggulangan penyakitberpotensi KKM

Sedangkan untuk mencapai Sasaran Strategis II : **Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**, kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masing-masing indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Nilai Kinerja Anggaran, kegiatan yang dilakukan :
 - 1) Melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor perencanaan program
 - 2) Penyusunan E-Renggar
 - 3) Penyusunan RKA KL
 - 4) Penyusunan RAK
 - 5) Pembahasan dan Penelaahan Usulan Dokumen Perencanaan Anggaran danRevisi Anggaran
 - 6) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program

- 7) Penyusunan Laporan E-Monev Penganggaran
 - 8) Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas / PP 39 Tahun 2006
 - 9) Penyusunan Laporan Tahunan Satker
 - 10) Penyusunan Laporan Indikator RAK
 - 11) Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja
 - 12) Mengikuti Evaluasi SAKIP
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, kegiatan yang dilakukan :
- 1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai
 - 2) Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
 - 3) Pengadaan Lahan (Lahan Kantor Wilker Paguat)
 - 4) Penyusunan Laporan Keuangan Semester I/ Semester II/ Triwulan III
 - 5) Pencairan Anggaran dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
 - 6) Penyusunan Laporan BMN, penghapusan dan pemusnahan BMN, penyelesaian masalah BMN, penyusunan RKBMN
 - 7) Pembangunan Kantor Wilker Kwandang
- c. Kinerja implementasi WBK satker, kegiatan yang dilakukan :
- 1) Penanganan pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system*
 - 2) Melaksanakan inventarisir Dumas dan Pengelolaan UPG
 - 3) Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPNS
 - 4) Implementasi keterbukaan informasi publik
 - 5) Desiminasi/ promosi informasi kegiatan melalui media cetak
 - 6) Implementasi budaya pelayanan prima
 - 7) Melakukan reviu data klasifikasi UPT
 - 8) Penyusunan dan reviu analisis beban kerja, peta dan informasi jabatan
 - 9) Penyusunan/Monev SOP AP UPT
 - 10) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK, penguatan dan pendampingan
 - 11) *assessment* penilaian Satker WBK/WBBM
 - 12) Pengelolaan Kantor BERHIAS
 - 13) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan

- 14) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- 15) Penataan Persuratan dan Kearsipan
- 16) Melaksanakan penyusutan arsip di lingkungan Ditjen P2

d. Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya, kegiatan yang dilakukan :

- 1) Melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai
- 2) Pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai
- 3) Layanan mutasi pegawai
- 4) Pembinaan pegawai
- 5) Diklat/Seminar/Kursus Dukungan Manajemen

C. Kerangka Kelembagaan

Sehubungan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam mewujudkan organisasi yang lebih proposional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, sehingga struktur organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo yang baru terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum;
2. Instalasi;
3. Wilayah Kerja;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo



Adapun tugas dan fungsi yang ada pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo adalah sebagai berikut :

- 1) Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
- 2) Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan

teknis bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

- 3) Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
- 4) Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- 5) Wilayah Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah di Pelabuhan/bandara, pemeliharaan dan peningkatan sanitasi di Pelabuhan/bandara serta pelayanan kesehatan terbatas di Pelabuhan/bandara yang berada jauh dari jangkauan Kantor Induk. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo memiliki lima (5) wilayah kerja dan 2 Pos Pelabuhan yaitu : Wilayah Kerja Bandara Djalaluddin Gorontalo, Wilayah Kerja Paguat, Wilayah Kerja Tilamuta, Wilayah Kerja Kwandang, Wilayah Kerja Anggrek, Pos Pelabuhan Laut Gorontalo dan Pos Pelabuhan Laut Gentuma.

D. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operational Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja sebagai dasar tambahan atau pengganti regulasi yang belum ditetapkan oleh pusat. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan. Regulasi yang telah ditetapkan pusat yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP sebagai berikut :

1. Undang – Undang RI Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular;
2. Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang – Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang - Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Undang – Undang RI Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajidan Umrah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2018 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 136/PMK.02/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran KementerianNegera / Lembaga;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberian Sertifikasi Vaksinasi International;
15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2017 tentang Standard Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor danBinatang Pembawa Penyakit dan Pengendaliannya;
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 40 tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal;
18. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 /Menkes/Per/VIII/2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat;
19. Keputusan Menteri Kesehatan No. 424/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan dalam rangka Karantina Kesehatan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan No. 425/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan No. 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan Di Pelabuhan;
22. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 442/Menkes/SK/VI/2009

tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji ;

23. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1314/Menkes/SK/IX/2010 tentang Pedoman Standarisasi Sumber daya Manusia, Sarana, dan Prasarana di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan;
24. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga;
25. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
26. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan;
27. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
28. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
29. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 tahun 2017 tentang Standard Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Hygiene sanitasi, Kolam renang, Solus Per Aqua , dan Pemandian Umum;
30. International Health Regulation 2005;
31. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
32. Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
33. Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis KKP Kelas II Gorontalo memiliki beberapa kebutuhan regulasi tambahan antara lain :

1. Regulasi atau SOP dalam Pengawasan Lalu Lintas Orang, Barang dan Kapal di Pelabuhan;
2. Regulasi atau SOP dalam Pengawasan Lalu Lintas Orang, Barang dan Pesawat di Bandara;
3. Regulasi atau SOP Pengawasan Faktor Risiko Masa Pandemi;
4. Regulasi atau SOP Verifikasi Fasyankes yang akan dan Memperpanjang Pelayanan Vaksinasi International;
5. Regulasi atau SOP Pengawasan Pelayanan Vaksinasi International di Fasyankes;
6. Regulasi atau SOP Pengendalian Risiko Lingkungan Masa Pandemi;
7. Regulasi atau SOP Pemeriksaan Akhir di Embarkasi;
8. Regulasi atau SOP Penyelenggaraan Asrama Karantina Kesehatan;
9. Regulasi atau SOP Pengendalian Gratifikasi;
10. Regulasi atau SOP Pengaduan Masyarakat;
11. Regulasi atau SOP Pengawasan *WhistBlowing*;
12. Regulasi atau SOP Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran;
13. Regulasi atau SOP Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan;
14. Regulasi atau SOP Pengelolaan Keuangan;
15. Regulasi atau SOP Pengelolaan BMN;
16. Regulasi atau SOP Penyusunan Laporan;
17. Regulasi atau SOP Pengumpulan Data;
18. Regulasi atau SOP Monitoring dan Evaluasi;
19. Regulasi atau SOP Pengelolaan Arsip;
20. Regulasi atau SOP Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

E. Kerangka Pendanaan

Tabel 3.4
Kerangka Pendanaan Kegiatan

No	Sasaran Program (Outcome)/Sa saran Kegiatan (Output)/Indikator	ALokasi Anggaran (Dalam Ribuan)					Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	
BKK Kelas I Gorontalo							
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1.308.000.	1.507.000	1.741.370.	2.467.572.	2.600.000	TIMKER IV
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	489.000.	530.000.	676.815	2.078.814	2.500.000	TIMKER I, II
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	374.223	409.000	94.977	551.767	575.000	TIMKER III
4	Nilai Kinerja Anggaran	202.880	202.880	690.400	773.938	780.000	Sub Bag Adum
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	80.000	90.000	16.857	8.551.276	8.600.000	Sub Bag Adum
6	Kinerja implementasi WBK satker	30.000	50.000	16.857	222.262	250.000	Sub Bag Adum
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	25.000	40.000	146.859	207.520	250.000	Sub Bag Adum

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

A. PEMANTAUAN

Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Selain hal tersebut pemantauan juga dilakukan dalam rangka memastikan target indikator yang ditetapkan berjalan sesuai dengan track dan melakukan upaya dini jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan merupakan penjabaran dari Rencana Aksi selama kurun 5 tahun. Rencana Aksi Kegiatan disusun setiap tahun berguna untuk memberikan panduan dan acuan dalam manajemen kegiatan, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, dan evaluasi pencapaian output kegiatan. Pemantauan Rencana Aksi Kegiatan dilakukan oleh Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Koordinator Substansi, Kepala Wilayah Kerja dan Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan program yang baik akan jauh lebih bermakna bila didukung dengan pelaporan kegiatan yang handal. Di dalam pelaporan tersebut terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk menilai keberhasilan program. Pelaporan pada KKP Kelas II Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Laporan e-Monev DJA

Laporan monitoring dan evaluasi (e-Monev DJA SMART) merupakan media yang menggambarkan capaian pelaksanaan Rincian Output Kegiatan dan capaian kinerja anggaran yang digunakan dalam mendukung

pelaksanaan kegiatan kinerja Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo. Pelaporan e-Monev DJA dilaksanakan setiapbulan dan per semester.

2. Laporan e-Monev Bappenas

Aplikasi E-Monev Bappenas merupakan aplikasi dalam rangka memantau data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia. Pelaporan e-Monev Bappenas Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo dilaksanakan setiap bulan dan per triwulan.

3. Laporan e-Performance

e-Performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Laporan e-Performance Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo memuat data terkait indikator kinerja kegiatan yang dilaporkan setiap bulan berdasarkan hasil kegiatan dari tugas dan fungsi keseluruhan yang dilaksanakan substansi

B. EVALUASI

Evaluasi yang merupakan bagian siklus penyusunan dan pemutakhiran Rencana Aksi sesuai dengan perkembangan terkini. Evaluasi bertujuan untuk menganalisis mengapa sasaran dapat tercapai atau tidak tercapai. Dengan adanya evaluasi kinerja kegiatan dapat memberikan gambaran alternatif solusi dan memberikan pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang (umpan balik).

Reviu Rencana Aksi Kegiatan Berupa rapat/ pertemuan bertujuan untuk mengkaji Rencana Aksi Kegiatan dan masalah-masalah yang berkenaan dengan pencapaian output. Hal-hal teknis mungkin ditangani pada tingkat organisasi, sedangkan isu-isu kebijakan yang memiliki implikasi penting dapat didiskusikan pada tingkat yang lebih tinggi. Rapat/pertemuan dilakukan secara teratur dilakukan diawal tahun sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Kegiatan tahun berikutnya. Rapat evaluasi bulanan digunakan untuk

mengukur dan memberi nilai capaian hasil kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, mengetahui dampak dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan dan membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan suatu programperencanaan yang akan datang.

C. PENGENDALIAN

Setiap unsur di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalamlingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait, serta harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo di pantau dan diawasi oleh Kepala Kantor bersama-sama dengan TIM Satuan Kepatuhan Intern dan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo. Media yang digunakan untuk memperoleh masukan baik dari kalangan internal, maupun eksternal (lintas program, lintas sektor, stakeholder, masyarakat) diantaranya yaitu: SP4N Lapor, WA, Email, Twiter, ataupun survei kepuasan masyarakat.

BAB V

P E N U T U P

Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BKK Kelas I Gorontalo Tahun 2025 - 2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian BKK Kelas I Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, seksi di BKK Kelas I Gorontalo mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2027) dan akhir periode 5 tahun (2029) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua seksi di BKK Kelas I Gorontalo. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BKK Kelas I Gorontalo dengan upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Lampiran 1 : Kerangka Logis Program

HIRARKI LOGIS	DESKRIPSI AKHIR / SASARAN	INDIKATOR	CARA VERIFIKASI	ASUMSI
<p>GOAL / TUJUAN</p>	<p>Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah</p>	<p>Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara</p>		<p>Tersedianya anggaran kegiatan Dukungan Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk dan Wilayah</p>
			<p>Data Pemeriksaan / Penafisan Orang</p>	<p>Lalu lintas orang, alat angkut, barang dan kondisi lingkungan dilakukan pemeriksaan dan pengendalian faktor risiko sesuai standar kekeantinaan kesehatan</p>
			<p>Data Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina</p>	
			<p>Data Pemeriksaan Barang (Jenazah)</p>	
		<p>Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan</p>	<p>Data Pemeriksaan Lingkungan</p>	<p>Seluruh faktor risiko penyakit di pintu masuk dapat dikendalikan</p>
			<p>Data Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang</p>	
			<p>Data Faktor Risiko yang dikendalikan pada Alat Angkut</p>	
			<p>Data Faktor Risiko yang dikendalikan pada Barang (Jenazah)</p>	
<p>Data Faktor Risiko yang dikendalikan pada Lingkungan (Sanitasi Lingkungan dan Pengendalian Vektor)</p>				

HIRARKI LOGIS	DESKRIPSI AKHIR / SASARAN	INDIKATOR	CARA VERIFIKASI	ASUMSI
GOAL / TUJUAN	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Laporan Kelengkapan data surveilans (rekomendasi untuk tiap-tiap jabfung)	Indeks pengendalian terpenuhi sesuai atau diatas target
			Laporan sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam	
			Laporan Penyusunan rencana kontigensi	
			Laporan Pengendalian Indeks pinjal	
			Laporan Pengendalian HI perimeter	
			Laporan Pengendalian larva anopheles	
			Laporan Pengendalian kepadatan kecoa	
			Laporan Pengendalian kepadatan lalat	
			Laporan Pengendalian TTU memenuhi syarat	
			Laporan Pengendalian TPM laik hygiene	
			Laporan Pengendalian Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan	
GOAL / TUJUAN	Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			Tersedianya anggaran kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Nilai Kinerja Penganggaran	Data Smart DJA Kemenkeu	Nilai SMART tercapai sesuai atau diatas target
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Data Omspan Kemenkeu	Nilai IKPA tercapai sesuai atau diatas target

HIRARKI LOGIS	DESKRIPSI AKHIR / SASARAN	INDIKATOR	CARA VERIFIKASI	ASUMSI
GOAL / TUJUAN	Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kinerja implementasi WBK satker	Hasil Penilaian Kinerja WBK Satker oleh Tim Penilai Internal	Nilai WBK Satker tercapai sesuai atau diatas target
		Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Data Peningkatan kapasitas SDM	ASN yang mengikuti peningkatan SDM terpenuhi sesuai atas diatas target
PURPOSE / MAKSUD	Pemeriksaan / Penafisan Orang di Pelabuhan / Bandara	Jumlah orang yang dilakukan pemeriksaan / penafisan di pelabuhan / bandara	Data Pemeriksaan / Penafisan Orang	Seluruh pelaku perjalanan diperiksa
	Pemeriksaan Alat Angkut sesuai standar kekarantina kesehatan	Jumlah alat angkut (kapal / pesawat) yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar kekarantina	Data Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina	Seluruh alat angkut diperiksa
	Pemeriksaan Barang di Pelabuhan / Bandara	Jumlah barang yang dilakukan pemeriksaan di pelabuhan / bandara	Data Pemeriksaan Barang (Jenazah)	Seluruh jenazah diperiksa
	Pemeriksaan Lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan	Jumlah titik lokasi yang dilakukan pemeriksaan lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan	Data Pemeriksaan Lingkungan	Seluruh sasaran titik lokasi diperiksa
	Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan pada Orang	Jumlah orang yang dilakukan pengendalian faktor risiko penyakit	Data Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang	Pelaku perjalanan tidak ditemukan faktor risiko

HIRARKI LOGIS	DESKRIPSI AKHIR / SASARAN	INDIKATOR	CARA VERIFIKASI	ASUMSI
PURPOSE / MAKSUD	Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan pada Alat Angkut	Jumlah alat angkut (kapal / pesawat) yang dilakukan pengendalian faktor risiko penyakit	Data Faktor Risiko yang dikendalikan pada Alat Angkut	Alat angkut tidak ditemukan faktor risiko
	Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan pada Barang	Jumlah barang yang dilakukan pengendalian faktor risiko penyakit	Data Faktor Risiko yang dikendalikan pada Barang (Jenazah)	Jenazah tidak ditemukan faktor risiko
	Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan pada Lingkungan	Jumlah titik lokasi yang dilakukan pengendalian faktor risiko penyakit	Data Faktor Risiko yang dikendalikan pada Lingkungan (Sanitasi Lingkungan dan Pengendalian Vektor)	Lingkungan tidak ditemukan faktor risiko
	Kelengkapan Data Surveilans yang dihasilkan oleh kelompok fungsional	Jumlah laporan / rekomendasi yang dihasilkan oleh kelompok fungsional	Laporan Kelengkapan data surveilans (rekomendasi untuk tiap-tiap jabfung)	Data surveilans disertai rekomendasi
	Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam	Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam	Laporan sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam	Tidak ditemukan sinyal SKD KLB dibawah 24 jam
	Dokumen Rencana Kontigensi	Jumlah dokumen rencana kontigensi yang tersusun pada pelabuhan / bandara	Laporan Penyusunan rencana kontigensi	Dokumen rencana kontigensi tersusun
	Nilai Indeks pinjal perimeter	Jumlah titik lokasi dengan nilai indeks pinjal perimeter ≤ 1	Laporan Pengendalian Indeks pinjal	Sasaran titik lokasi memenuhi standar
	Nilai House Indeks (HI) perimeter	Jumlah titik lokasi dengan nilai House Indeks (HI) perimeter = 0	Laporan Pengendalian HI perimeter	Sasaran titik lokasi memenuhi standar
	Tidak ditemukan larva anopheles	Jumlah titik lokasi yang tidak ditemukan larva anopheles	Laporan Pengendalian larva anopheles	Sasaran titik lokasi memenuhi standar
	kepadatan kecoa rendah	Jumlah titik lokasi dengan kepadatan kecoa rendah	Laporan Pengendalian kepadatan kecoa	Sasaran titik lokasi memenuhi standar

HIRARKI LOGIS	DESKRIPSI AKHIR / SASARAN	INDIKATOR	CARA VERIFIKASI	ASUMSI
PURPOSE / MAKSUD	kepadatan lalat < 2	Jumlah titik lokasi dengan kepadatan lalat < 2	Laporan Pengendalian kepadatan lalat	Sasaran titik lokasi memenuhi standar
	TTU memenuhi syarat	Jumlah titik lokasi dengan Tempat -Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat	Laporan Pengendalian TTU memenuhi syarat	Sasaran titik lokasi memenuhi standar
	TPM laik hygiene	Jumlah titik lokasi dengan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang laik higiene	Laporan Pengendalian TPM laik hygiene	Sasaran titik lokasi memenuhi standar
	Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan	Jumlah titik lokasi dengan kualitas air bersih yang memenuhi syarat kesehatan	Laporan Pengendalian Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan	Sasaran titik lokasi memenuhi standar
	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran KKP Kelas II Gorontalo	Dokumen DIPA RKAKL	DIPA RKAKL tanpa blokir
	Dokumen pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	Dokumen Monitoring dan Evaluasi (Smart DJA, Bappenas, E-Performance)	Dokumen Monev tersusun tepat waktu
	Dokumen pengelolaan keuangan dan barang milik negara	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN	Laporan Keuangan dan BMN	Laporan tersusun tepat waktu tanpa rekomendasi
	Dokumen pengelolaan organisasi dan tatalaksana dan hubungan masyarakat	Jumlah dokumen revisi SOP	Dokumen SOP	SOP tersusun dengan baik
	Laporan pengelolaan kerumahtanggaan	Jumlah laporan pemeliharaan kantor	Data BMN	Data BMN terinput dengan tertib

HIRARKI LOGIS	DESKRIPSI AKHIR / SASARAN	INDIKATOR	CARA VERIFIKASI	ASUMSI
PURPOSE / MAKSUD	Dokumen pengelolaan kearsipan dan persuratan	Jumlah dokumen yang diarsipkan dalam bentuk digital	Data Arsip Aktif dan Inaktif	Pengelolaan arsip terlaksana dengan baik
	Dokumen Penataan Sistem Manajemen SDM	Jumlah dokumen penataan sistem manajemen SDM	Dokumen Bezetting, ABK, Peta jabatan	Dokumen kepegawaian tersusun dengan baik
	Dokumen pengembangan kapasitas SDM	Jumlah laporan pengembangan SDM	Data peningkatan kapasitas SDM	ASN terpenuhi 20 JPL
OUTPUT / KELUARAN	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Jumlah pelayanan publik kepada masyarakat yang dilaksanakan	Laporan pelayanan Kesehatan haji dan Pelayanan kesehatan di pelabuhan / bandara	Pelayanan kesehatan haji dan dipelabuhan / bandara terlaksana dengan baik
	Pelayanan Publik Lainnya	Jumlah pelayanan publik lainnya yang dilaksanakan	Laporan pelayanan kekarantina kesehatan, pengendalian vektor, lingkungan dan pengawasan di pelabuhan / bandara	Pelayanan kekarantina kesehatan terlaksana dengan baik
	Sarana Bidang Kesehatan	Jumlah sarana bidang kesehatan yang dilakukan pengadaan	Data pengadaan barang dan jasa	Sarana kegiatan terpenuhi sesuai kebutuhan
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	data pendidikan dan pelatihan yang diikuti ASN	ASN terpenuhi 20 JPL
	Layanan Perkantoran	Jumlah layanan perkantoran yang dilaksanakan	Data pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional perkantoran	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta operasional perkantoran telaksana dengan baik
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal yang dilaksanakan	Dokumen usulan perencanaan dan hasil reuiu	Usulan perencanaan tanpa rekomendasi

HIRARKI LOGIS	DESKRIPSI AKHIR / SASARAN	INDIKATOR	CARA VERIFIKASI	ASUMSI
OUTPUT / KELUARAN	Layanan Umum	Jumlah Layanan Umum yang dilaksanakan	Laporan pelayanan umum dan perlengkapan	Layanan umum terlaksana dengan baik
	Layanan Sarana Internal	Jumlah Layanan Sarana Internal yang dilaksanakan	Data pengadaan barang dan jasa	Sarana kegiatan terpenuhi sesuai kebutuhan
	Layanan SDM	Jumlah Layanan SDM yang dilaksanakan	Data mutasi, pembinaan dan peningkatan SDM	ASN terpenuhi 20 JPL
	Layanan Hukum	Jumlah Layanan Hukum yang dilaksanakan	Laporan PPNS	Tidak ditemukan atau tertanganinya kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal yang dilaksanakan	Dokumen Pokja WBK	Nilai WBK terpenuhi
	Layanan Kehumasan dan Protokoler	Jumlah Layanan Kehumasan dan Protokoler yang dilaksanakan	Data kehumasan dan protokoler	layanan kehumasan dan protokoler terlaksana dengan baik
	Layanan Data dan Informasi	Jumlah Layanan Data dan Informasi yang dilaksanakan	Tenaga perbantuan teknis dan data pengawasan	Terpenuhi tenaga pengawasan di pintu masuk
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan yang dilaksanakan	Laporan monitoring dan evaluasi	Monev kinerja terlaksana dengan baik dan hasil kinerja optimal
	Pengelolaan Keuangan Negara	Jumlah Pengelolaan Keuangan Negara yang dilaksanakan	Laporan keuangan dan BMN	Laporan keuangan tanpa rekomendasi dan tata kelola BMN terlaksana dengan baik
ACTIVITY / KEGIATAN	Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji	Laporan Penyelenggaraan Kesehatan Haji	Calon / jamaah haji berangkat dan datang dalam keadaan sehat

HIRARKI LOGIS	DESKRIPSI AKHIR / SASARAN	INDIKATOR	CARA VERIFIKASI	ASUMSI
ACTIVITY / KEGIATAN	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas	Jumlah Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas	Laporan pelayanan kesehatan di pelabuhan / bandara	Pelayanan kesehatan terlaksana dengan baik
	Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara	Jumlah Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara	Laporan kekarantinaan kesehatan di bandara	kekarantinaan kesehatan di bandara terlaksana dengan baik
	Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	Jumlah Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	Laporan Posko Lebaran dan Nataru	Kegiatan posko lebaran dan nataru terlaksana dengan baik
	Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan	Jumlah Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan	Data Rujukan	Rujukan terlayani dengan baik
	Layanan Pengendalian Vektor DBD	Jumlah Layanan Pengendalian Vektor DBD	Data Pengendalian Vektor	Vektor DBD terkendali
	Layanan Survey Vektor Pes	Jumlah Layanan Survey Vektor Pes	Data Survei Vektor Pes	Survei Vektor Pes terlaksana dengan baik
	Layanan Pengendalian Vektor Diare	Jumlah Layanan Pengendalian Vektor Diare	Data Pengendalian Vektor Diare	Vektor Diare terkendali
	Layanan Survey Vektor DBD	Jumlah Layanan Survey Vektor DBD	Data Survei Vektor DBD	Survei Vektor DBD terlaksana dengan baik
	Layanan Survey Vektor Malaria	Jumlah Layanan Survey Vektor Malaria	Data Survei Vektor malaria	Survei Vektor Malaria terlaksana dengan baik
	Layanan Survey Vektor Diare	Jumlah Layanan Survey Vektor Diare	Data Survei Vektor diare	Survei Vektor Diare terlaksana dengan baik

HIRARKI LOGIS	DESKRIPSI AKHIR / SASARAN	INDIKATOR	CARA VERIFIKASI	ASUMSI
ACTIVITY / KEGIATAN	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	Jumlah Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	Data Skrining HIV AIDS	Skrining HIV AIDS tidak ditemukan positif
	Layanan Deteksi Dini Terduga TBC	Jumlah Layanan Deteksi Dini Terduga TBC	Data Skrining TB	Skrining TB tidak ditemukan positif
	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	Jumlah Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	Data pengendalian faktor risiko lingkungan	Faktor risiko lingkungan terkendali
	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	Data pemeriksaan di pelabuhan / bandara	Pemeriksaan orang, barang, alat angkut terlaksana dengan baik
	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	Jumlah Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	Data pengadaan barang dan jasa	Alat dan bahan kegiatan terpenuhi
	Pelatihan Kesehatan	Jumlah Pelatihan Kesehatan	Data pelatihan yang diikuti ASN	ASN terpenuhi 20 JPL
	Gaji dan Tunjangan	Jumlah Gaji dan Tunjangan	Data pemabayaran gaji dan tunjangan	Gaji dan tunjangan ASN dibayarkan dengan tertib
	Operasional dan Pemeliharaan	Jumlah Operasional dan Pemeliharaan	Data pemeliharaan dan operasional perkantoran	Pemeliharaan dan operasional perkantoran terpenuhi dengan baik

HIRARKI LOGIS	DESKRIPSI AKHIR / SASARAN	INDIKATOR	CARA VERIFIKASI	ASUMSI
ACTIVITY / KEGIATAN	Rencana Program Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Dukungan Manajemen	Jumlah Rencana Program Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Dukungan Manajemen	Dokumen DIPA / RKAKL	DIPA RKAKL tanpa blokir
	Layanan Umum dan Perlengkapan	Jumlah Layanan Umum dan Perlengkapan	Laporan pelayanan umum dan perlengkapan	Layanan umum dan perlengkapan terlaksana dengan baik
	Sarana Internal	Jumlah Sarana Internal	Data pengadaan barang dan jasa	Sarana kegiatan terpenuhi sesuai kebutuhan
	Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2	Data mutasi, pembinaan dan peningkatan SDM	Layanan administrasi kepegawaian terlaksana dengan baik
	Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2	Jumlah Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2	Laporan PPNS	Pelanggaran kekarantina kesehatan tertangani dengan baik
	Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Jumlah Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dokumen Pokja WBK	Nilai WBK terpenuhi
	Pelayanan Humas dan Protokoler	Jumlah Pelayanan Humas dan Protokoler	Data kehumasan dan protokoler	Pelayanan humas dan protokoler terlaksana dengan baik
	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program	Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program	Laporan monitoring dan evaluasi	Data monev disusun dengan baik
	Pengelolaan Keuangan Ditjen P2	Jumlah Pengelolaan Keuangan Ditjen P2	Laporan keuangan dan BMN	Laporan keuangan tanpa rekomendasi dan tata kelola BMN terlaksana dengan baik

LAMPIRAN 2

MATRIKS TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN

(dalam ribu)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah							2.171.223	3.000.569	2.723.047	3.491.696	4.469.370
		Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekearifan kesehatan	507.092	600.000								
		Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN			0.91	0.92	0.93					
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	97%	98%	100%					
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	80%	90%	0.91	0.92	0.93					
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit							10.645.084	9.245.435	10.601.152	15.732.550	15.750.000
		Nilai kinerja anggaran	80	83	85	87	90					
		Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	-	-	-	-					

	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	-	93	93	93	93						
	Kinerja implementasi WBK satker	70	75	76	76	76						
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	45%	80%	80%	80%	80%						
	Total Anggaran						12.816.307	12.246.004	13.324.119	19.224.246	20.219.370	

Lampiran 3

MATRIKS DEFINISI OPERASIONAL DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATANRENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2020 – 2024

NO	TUJUAN PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	DO	CARA HITUNG	TARGET				
						2025	2026	2027	2028	2029
1			Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan	Pemeriksaan/ Penapisan orang, Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina, Pemeriksaan Barang, Pemeriksaan Lingkungan {TTU, TPM}	715.821	715.821	727.060	727.0601	738.281
			Indeks Deteksi Faktor Risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN	Status kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/bandara/P LBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun	Nilai Indeks Indikator 1	0.93	0.93	0.94	0.94	0.95
					Jumlah Pemeriksaan Orang (rekap laporan harian, data poliklinik, ICV, pemeriksaan HIV/TB/Malaria)	708.982	708.982	720.000	720.000	731.000
					Jumlah Pemeriksaan Alat Angkut (COP, PHQC, Gendec)	6.500	6.500	6.700	6.700	6.900
					Jumlah Pemeriksaan Barang (jenazah)	25	25	30	30	35
					Jumlah Pemeriksaan Lingkungan (TPP, Air, ISPAP, TTU, vektor)	314	314	330	330	346
2			Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun	Jumlah capaian indikator	98%	98%	98%	98%	98%
					Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang	98%	98%	98%	98%	98%
					Faktor Risiko yang dikendalikan pada Alat Angkut	98%	98%	98%	98%	98%
					Faktor Risiko yang dikendalikan pada Barang	98%	98%	98%	98%	98%
					Faktor Risiko yang dikendalikan pada Lingkungan	98%	98%	98%	98%	98%

3	Meningkatnya Kemampuan Surveilans Berbasis Laboratorium	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	Jenis kegiatan pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dengan kegiatan yang dinilai berupa kelengkapan data surveilans, jumlah sinyal SKD KLB dan bencana yang di respon kurang dari 24 jam, penyusunan rencana kontigensi, indeks pinjal < 1, HI perimeter = 0, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah, kepadatan lalat < 2, TTU memenuhi syarat, TPM laik hygiene dan tempat penyediaan air bersih memenuhi standar kesehatan	% Target = x/y	100	100	100	100	100
			Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/ PLBDN	Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	Jumlah capaian indikator	0,93	0,93	0,94	0,94	0,95
			Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direpson kurang dari 24 jam	22	22	25	25	28		
			Indeks pinjal ≤ 1	54	54	60	60	66		
			HI perimeter = 0	72	72	82	82	92		
			HI Buffer = 0	72	72	82	82	92		
			Tidak ditemukan larva anopheles	12	12	18	18	21		
			kepadatan kecoa rendah	24	24	30	30	36		
			kepadatan Lalat > 2	24	24	30	30	36		
			TPP Laik Hygiene	69	69	78	78	87		
			TTU memenuhi syarat	69	69	78	78	87		
			Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan	12	12	17	17	20		

Lampiran 4

MATRIKS STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM

Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus	Tahun Pelaksanaan	Kegiatan	Anggaran
					Tahun 2025 : Rp. 2.171.223.000 Tahun 2026 : Rp. 3.000.569.000 Tahun 2027 : Rp. 2.723.047.000 Tahun 2028 : Rp. 3.491.696.000 Tahun 2029 : Rp. 4.469.370.000
1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/ PLBDN	1. Pemenuhan SDM kekarantinaan yaitu melalui pengangkatan CPNS maupun mutasi pegawai dari instansi lain, dan pengangkatan tenaga relawan untuk melaksanakan pengawasan selama masa pandemic covid-19 di wilayah Bandara/Pelabuhan. 2. Pelaksanaan sosialisasi melalui media cetak berupa banner, leaflet, penyuluhan secara langsung pada	1. Wilayah Kerja Bandara Djalaluddin 2. Wilayah Kerja Paguat 3. Wilayah Kerja Tilamuta 4. Wilayah Kerja Kwandang 5. Wilayah Kerja Anggrek 6. Pos Pelabuhan Laut Gorontalo 7. Pos Pelabuhan Laut Gentuma	Tahun 2020 s/d Tahun 2024 : 1. Wilayah Kerja Bandara Djalaluddin 2. Wilayah Kerja Paguat 3. Wilayah Kerja Tilamuta 4. Wilayah Kerja Kwandang 5. Wilayah Kerja Anggrek 6. Pos Pelabuhan Laut Gorontalo 7. Pos Pelabuhan Laut Gentuma	1. Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Pelabuhan dan Bandara 2. Pembentukan Forum Pelabuhan/Bandar Udara Sehat 3. Pertemuan Evaluasi Forum Pelabuhan/ Bandara Sehat 4. Pelayanan Kesehatan 5. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP 6. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Penyeberangan	

	<p>saat proses validasi/pemeriksaan dan media online satker.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial instagram tentang peraturan bagi pelaku perjalanan udara dan laut.</p> <p>4. Pendekatan lebih intensif berupa komunikasi cepat /langsung terhadap jejaring kerja (LPLS) di pelabuhan dan bandara sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat terkait peraturan yang telah ditetapkan dapat diterima dengan baik.</p>		<p>7. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara</p> <p>8. Layanan Kekarantinaan dalam Rangka Penerbitan PHQC</p> <p>9. Layanan Pemeriksaan P3K kapal</p> <p>10. Layanan Kesehatan pada Situasi Khusus</p> <p>11. Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi</p> <p>12. Pelayanan Kesehatan Embarkasi</p> <p>13. Pelayanan Kesehatan Debarkasi</p> <p>14. Pemeriksaan Alat Angkut, Orang dan Barang di Pelabuhan/Bandara</p> <p>15. Pemeriksaan Alat Angkut, Orang dan Barang pada situasi KLB/Wabah/KKM</p> <p>16. Verifikasi terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang mengajukan persetujuan penerbitan ICV</p> <p>17. Pengawasan terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang melaksanakan penerbitan ICV</p> <p>18. Pertemuan evaluasi LS,LP, dan Klinik/RS Penerbitan Dokumen ICV</p> <p>19. Pelayanan Vaksinasi</p> <p>20. Pelayanan mobile vaksinasi Covid-19</p> <p>21. Layanan survei vektor PES</p>	
--	---	--	---	--

				<p>22. Layanan survei faktor risiko penyakit DBD</p> <p>23. Layanan survei faktor risiko penyakit Malaria</p> <p>24. Layanan survei faktor risiko penyakit diare</p> <p>25. Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS</p> <p>26. Layanan survei faktor risiko penyakit TB</p> <p>27. Pengadaan sarana dan prasarana Pengendalian Vektor dan BPP</p> <p>28. Pengadaan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan</p> <p>29. Pengadaan Alat dan Bahan Medis dan Non Medis Untuk Pelayanan</p> <p>30. Pengadaan sarana dan prasarana Penanganan Covid-19</p> <p>31. Koordinasi Pelayanan kekarantinaaan di Pelabuhan/Bandara/PLBD</p> <p>32. Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria</p>	
--	--	--	--	--	--

<p>2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan alat screening lanjutan yang memadai untuk pemeriksaan orang. 2. Pengadaan alat angkut penunjang Penyelidikan Epidemiologi (PE) yang memadai dan dapat menjangkau lokasi. 3. Pemberian edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan penyakit berpotensi KLB (Covid-19) melalui media <i>online</i> maupun <i>offline</i>. 4. Koordinasi dengan LPLS terkait penanganan rujukan ke rumah karantina/ fasilitas Kesehatan terkait penemuan pelaku perjalanan terkonfirmasi positif Covid-19/ faktor risiko penyakit lainnya. 5. Pemberian edukasi kepada keagenan, nahkoda/awak kapal terkait pentingnya tindakan penyehatan dan tindakan karantina kapal untuk mencegah dan mengendalikan penyakit baik menular maupun tidak menular. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah Kerja Bandara Djalaluddin 2. Wilayah Kerja Paguat 3. Wilayah Kerja Tilamuta 4. Wilayah Kerja Kwandang 5. Wilayah Kerja Anggrek 6. Pos Pelabuhan Laut Gorontalo 7. Pos Pelabuhan Laut Gentuma 	<p>Tahun 2020 s/d Tahun 2024 :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Wilayah Kerja Bandara Djalaluddin . Wilayah Kerja Paguat . Wilayah Kerja Tilamuta . Wilayah Kerja Kwandang . Wilayah Kerja Anggrek . Pos Pelabuhan Laut Gorontalo . Pos Pelabuhan Laut Gentuma 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan Pengendalian Faktor Risiko pada Situasi Khusus dan KLB 2. Penyelidikan Epidmiologi Faktor Risiko pada Situasi Khusus dan KLB 3. Penyehatan Lingkungan melalui pemeriksaan sanitasi lingkungan : Kualitas air, makanan, limbah, udara, kebisingan dan sanitasi gedung/bangunan 4. Uji Resistensi Insektisida 5. Pelayanan rujukan dan respon cepat 6. Tindakan Pengendalian Faktor Risiko Alat angkut, Orang dan Barang 7. Pengelolaan Limbah Medis 8. Pelayanan Kesehatan Rutin / Vaksinasi International dan Poliklinik di Pelabuhan/Bandara 9. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandara 10. Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Penerbitan SSCC/SSCEC 11. Layanan Tindakan Penyehatan Alat Angkut 12. Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan 	
--	---	---	---	---	--

	<p>6. Penyebarluasan SOP secara menarik dan mudah dipahami melalui pendekatan dan komunikasi langsung dengan pihak terkait.</p> <p>7. Pemberian rekomendasi perbaikan untuk penyehatan lingkungan di wilayah Bandara/Pelabuhan.</p>			<p>13. Layanan Pengendalian Vektor</p> <p>14. Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan Termasuk Pemeriksaan Rectal Swab</p>	
<p>3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara</p>	<p>1. Pengaktifan sistem komunikasi cepat untuk melakukan <i>update</i> informasi dan menyeragamkan pemahaman terkait peraturan yang berlaku dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk.</p> <p>2. Penyampaian laporan secara berjenjang dari level petugas hingga ke pemangku jabatan sehingga mempermudah koordinasi lintas sektor karena adanya perubahan peraturan.</p> <p>3. Penambahan jumlah SDM dengan rekrutmen tenaga PPPK untuk memperkuat pengawasan lalu lintas orang dan alat angkut di</p>	<p>. Wilayah Kerja Bandara Djalaluddin</p> <p>. Wilayah Kerja Paguat</p> <p>. Wilayah Kerja Tilamuta</p> <p>. Wilayah Kerja Kwandang</p> <p>. Wilayah Kerja Anggrek</p> <p>. Pos Pelabuhan Laut Gorontalo</p> <p>. Pos Pelabuhan Laut Gentuma</p>	<p>Tahun 2020 s/d Tahun 2024 :</p> <p>. Wilayah Kerja Bandara Djalaluddin</p> <p>. Wilayah Kerja Paguat</p> <p>. Wilayah Kerja Tilamuta</p> <p>. Wilayah Kerja Kwandang</p> <p>. Wilayah Kerja Anggrek</p> <p>. Pos Pelabuhan Laut Gorontalo</p> <p>. Pos Pelabuhan Laut Gentuma</p>	<p>1. Pengumpulan, Analisa data, diseminasi hasil surveilans Sosialisasi</p> <p>2. Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi KKM</p> <p>3. Reviu Dokumen Rencana Kontinjensi KKM</p> <p>4. Simulasi / <i>Table Top Exercise</i> Penanggulangan KKM</p> <p>5. Peningkatan kapasitas SDM Sanitarian dan Entomolog</p> <p>6. Peningkatan kualitas SDM kualifikasi Karantina Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi</p> <p>7. Peningkatan kualitas SDM Kualifikasi tenaga medis dan paramedis</p> <p>8. Refreshing Tim TGC dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit berpotensi KKM</p>	

	pintu masuk pelabuhan dan bandara.				
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					Tahun 2020 : Rp. 10.645.084.000 Tahun 2021 : Rp. 9.245.435.000 Tahun 2022 : Rp. 10.601.152.000 Tahun 2023 : Rp. 15.732.550.000 Tahun 2024 : Rp. 15.750.000.000
4. Nilai kinerja anggaran	1. Komitmen Bersama pengelola program dan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan dan penarikan dana sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 2. Koordinasi dengan pusat terkait capaian yang melebihi target yang dianggap sebagai data anomali.	Sub Bagian Administrasi Umum	Tahun 2022 s/d Tahun 2024 : Sub Bagian Administrasi Umum	1. Melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor perencanaan program 2. Penyusunan E-Renggar 3. Penyusunan RKA KL 4. Penyusunan RAK 5. Pembahasan dan Penelaahan Usulan Dokumen Perencanaan Anggaran dan Revisi Anggaran 6. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program	

				<ul style="list-style-type: none"> 7. Penyusunan Laporan E-Monev Penganggaran 8. Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas / PP 39 Tahun 2006 9. Penyusunan Laporan Tahunan Satker 10. Penyusunan Laporan Indikator RAK 11. Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja 12. Mengikuti Evaluasi SAKIP 	
5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan revisi halaman III DIPA sesuai jadwal yang ditetapkan atau apabila ada perubahan rencana penarikan dana agar nilai pada IKPA meningkat. 2. Melakukan evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan anggaran kegiatan sesuai RPK dan RPD. 3. Meningkatkan ketelitian dan kecermatan operator dalam pembuatan SPM sehingga mengurangi kesalahan dalam pembuatan SPM. 	Sub Bagian Administrasi Umum	Tahun 2022 s/d Tahun 2024 : Sub Bagian Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 2. Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3. Pengadaan Kendaraan Bermotor (Mobil Ambulance Penyakit Menular) 4. Pengadaan Lahan (Lahan Kantor Wilker Batulicin) 5. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I/ Semester II/ Triwulan III 6. Pencairan Anggaran dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 7. Penyusunan Laporan BMN, penghapusan dan pemusnahan BMN, 	

				penyelesaian masalah BMN, penyusunan RKBMN 8. Pembangunan Kantor Wilker Batulicin	
6. Kinerja implementasi WBK satker	1. Pendampingan Hukormas P2 dalam rangka meningkatkan kinerja implementasi WBK. 2. Persiapan dan penyampaian dokumen penilaian WBK secara tepat waktu dengan meningkatkan Kerjasama tim Pokja.	Sub Bagian Administrasi Umum	Tahun 2022 s/d Tahun 2024 : Sub Bagian Administrasi Umum	1. Penanganan pengaduan masyarakat dan <i>whistleblowing system</i> 2. Melaksanakan inventarisir Dumas dan Pengelolaan UPG 3. Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPNS 4. Implementasi keterbukaan informasi publik 5. Desiminasi/ promosi informasi kegiatan melalui media cetak 6. Implementasi budaya pelayanan prma 7. Melakukan reuiu data klasifikasi UPT 8. Penyusunan dan reuiu analisis beban kerja, peta dan informasi jabatan 9. Penyusunan/Monev SOP AP UPT 10. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK, penguatan dan pendampingan <i>assessment</i> penilaian Satker WBK/WBBM 11. Pengelolaan Kantor BERHIAS 12. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	

